BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya peningkatan kesejahteraan lansia terlantar di Nagari Halaban, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Upaya peningkatan kesejahteraan lansia terlantar di Nagari Halaban telah dilakukan melalui keterlibatan Dinas Sosial, Pemerintah Nagari, keluarga, dan masyarakat. Dinas Sosial memberikan bantuan berupa permakanan dan alat bantu sesuai dengan kebutuhan lansia, sedangkan Pemerintah Nagari berperan dalam pendataan, pengusulan bantuan, serta pemberian BLT. Dalam menentukan penerima bantuan, pemerintah juga melibatkan wali nagari, kepala jorong, dan masyarakat. Selain itu, keluarga dan masyarakat turut membantu lansia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, upaya tersebut belum sepenuhnya maksimal.
2. Faktor yang mendukung peningkatan kesejahteraan lansia terlantar di Nagari Halaban antara lain akses jalan yang cukup mudah untuk menjangkau tempat tinggal lansia, kesadaran dan kepedulian masyarakat, kedekatan tempat tinggal antarwarga, budaya gotong royong, serta kemampuan lansia dalam berkomunikasi dan menyampaikan kebutuhannya. Dukungan tersebut memudahkan pihak yang memberikan bantuan untuk mengetahui kondisi lansia dan memberikan pertolongan secara langsung. Sementara itu, faktor yang menghambat meliputi keterbatasan anggaran, belum tersedianya panti sosial bagi lansia di Kabupaten Lima Puluh Kota, pendataan lansia yang belum sepenuhnya lengkap, aturan penggunaan Dana Desa untuk BLT yang dibatasi paling banyak 15%, bertambahnya jumlah lansia yang membutuhkan bantuan, serta terbatasnya jumlah petugas dibandingkan dengan wilayah yang harus dijangkau.

UIN IMAM BONJOL PADANG

3. Ditinjau dari *Siyasah Dusturiyah*, upaya peningkatan kesejahteraan lansia terlantar di Nagari Halaban telah menunjukkan adanya penerapan prinsip keadilan, musyawarah, persamaan, kemaslahatan, dan tanggung jawab. Hal tersebut terlihat dari adanya usaha pemerintah untuk memberikan bantuan kepada lansia yang membutuhkan, melibatkan pihak nagari dan masyarakat dalam menentukan penerima bantuan, serta melakukan pendataan dan pemeriksaan terhadap kondisi lansia. Namun, penerapannya belum sepenuhnya maksimal karena masih terdapat lansia yang belum memperoleh bantuan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah dan Dinas Sosial perlu meningkatkan jumlah dan jangkauan bantuan yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari. Pendataan lansia juga perlu diperbarui secara rutin agar lansia yang membutuhkan tidak terlewat dari pelayanan. Selain itu, pemerintah perlu mempertimbangkan penyediaan panti atau tempat pelayanan khusus bagi lansia yang membutuhkan perawatan lebih lanjut.
2. Pemerintah Nagari Halaban diharapkan terus memperbarui data lansia di setiap jorong dan lebih aktif melihat kondisi lansia secara langsung. Dalam menentukan penerima bantuan, pemerintah nagari perlu tetap mengutamakan kondisi dan kebutuhan nyata lansia serta melibatkan masyarakat dalam memberikan informasi.
3. Masyarakat Keluarga dan masyarakat di Nagari Halaban diharapkan terus memberikan perhatian kepada lansia, terutama bagi lansia yang tinggal sendiri dan tidak memiliki penghasilan tetap.

UIN IMAM BONJOL PADANG

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.

Agustino, Leo. 2020. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Edisi Revisi Kedua). Alfabeta.

Akbar, F., Darmiati, Arfan, F., & Putri, A. A. Z. 2021. *Pelatihan dan Pendampingan Kader Posyandu Lansia di Kecamatan Wonomulyo*. *2*(2): 392–397.

Amin, Ibnu. 2022. *Implementasi Hukum Islam dalam Falsafah Adat Basandi Syarak , Syarak Basandi Kitabullah di Minangkabau*. *38*(1).

Anggraini, Nadia. Ridzka. 2022. Upaya Wali Nagari Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Mewujudkan Tujuan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Di Nagari Kuranji Hulu. *Peran Serta Mekanisme Pemerintahan Nagari Dan Pemuka Adat Dalam Kehidupan Masyarakat* 111:136

Ardiyanti, D., Hartati, H., & Nuriyatman, E. 2025. Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia Melalui Kebijakan Pemerintah Provinsi (Studi Penelitian Pemerintah Kota Jambi). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, *8*(2), 427–444.

Aryantoni, Ferry. 2026. *Wawancara dengan Ferry Aryantoni, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota*.

Asniwar. 2026. *Wawancara dengan Asniwar, Lansia Penerima Manfaat*.

Atjil, F., & Saleh, G. S. 2025. Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Lanjut Usia Terlantar di Kabupaten Pohuwato. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, *Vol 17 No*, 186.

Badan Pusat Statistik. 2025. *Kecamatan Lareh Sago Halaban Dalam Angka 2025*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota.

Creswell, J. W. 2023. *Qualitative, quantitative and mixed methods approaches*. Sage.

Dinas Sosial. 2023. *Sejarah Singkat Terbentuknya Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota*. Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dinas Sosial. 2024. *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024*. Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dinas Sosial. 2026. *Berita Kegiatan Dinas Sosial*. Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota.

Djazuli, Ahmad. 2003. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Kencana.

Fatah, Abdul. 2026. *Wawancara dengan Abdul Fatah, Ketua LAZISNU Kabupaten Lima Puluh Kota*.

Fernando. 2025. Peran Tungku Tigo Sajarangan Dalam Proses Demokratisasi Dan Manajemen Pemerintahan Nagari. *Warta Dharmawangsa*.

Fitriyani, C., & Septiavin, Q. (2025). *Peningkatan Usia Pensiun untuk Meningkatkan Kesejahteraan Penduduk Lanjut Usia*. *VIII*(2), 222–241.

Hakim, Lukman. 2020. Urgensi Revisi Undang-Undang tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, *11*(1), 43–55.

Kecamatan Lareh Sago Halaban. 2022. *Profil Kecamatan Lareh Sago Halaban*. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Hartati, R., & Anggarini, Y. 2014. *Analisis perbedaan efektivitas organisasi ditinjau dari kesesuaian, kekuatan, dan tipe budaya*. *15*(2000), 77–94.

Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana.

Iqbal, Muhammad. 2016. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*.

UNIVERSITAS ISLAM BONJOL PADANG

Prenadamedia Group.
Kadri, W., & Tumadi, N. H. 2022. Siyasah Syariyah & Fiqih Siyasah. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, *5*(II).
Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 2023. *Desa Wisata Nagari Halaban*. Jadesta Kemenparekraf.
Khallaf, Abdul. Wahhab. 2003. *Al-Siyasah al-Syar'iyyah*. Dar al-Qalam.
Kuntarto, T., & Hanri, M. 2022. Dampak Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai Terhadap Kesejahteraan Lansia di Indonesia. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, *7*(9).
Mahmudi. 2019. *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Edisi 3, Cetakan 2). UPP STIM YKPN.
Marlina, Meli. 2024. *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bagi Lansia (Lanjut Usia) Di Kampung Rantau Panjang Kecamatan Koto Gasib*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Muadi, Sholih. (2016). *Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik*. *06*, 195–224.
Ningsih, Yulia. 2023. Peran Perantau dalam Pembangunan Nagari Perspektif Collaborative Governance (*Literature Review*). *Journal of Public Administration and Management Studies*, *1*(1), 18–24.
Nur, A. C., & Guntur, M. 2019. Analisis Kebijakan Publik. *Makassar: Publisher UNM*.
Pratiwi, E. B. 2022. *Evaluasi Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Telantar Di Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan (Studi Pada Kecamatan Sidomulyo)*.
Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media.
Puspitasari, R. B., & Arsiyah. (2015). *Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Lanjut Usia Di Kabupaten Sidoarjo*. *Vol.3*, 199–212.
Putri, S. D., Anggraini, R., Moeis, I., & Rafni, A. 2026. Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Lansia Terlantar di Kota Padang. *Journal of Education, Cultural and Politics*, *6*(2): 270–279.
Rendy, Nuryanto. (2025). *Peran Majelis Wakil Cabang Nahdatul Ulama Dalam Meningkatan Solidaritas Sosial Masyarakat Melalui Kegiatan Sosial Keagamaan Di Kecamatan Punggur*. UIN Raden Intan Lampung.
Rismayanti, Jafar, U., & Halimang, S. 2023. Pengelolaan Pemerintahan Desa Perspektif Siyasah Syar'iyyah: Studi Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah*, *4*(3), 1.
Rusmini, Andin. 2025. *Analisis Kebijakan Publik Dan Regulasi Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara: Implikasi Terhadap Otonomi Daerah Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja*. *2*(3), 305–313.
Ruwaida. 2026. *Wawancara dengan Ruwaida, Lansia Penerima Manfaat*.
Situngkir, R., Lidya, H. P., & Ledor, E. U. 2023. *Hubungan Perubahan Peran Sosial Dengan Depresi Pada Lansia di Kelurahan Lette Kota Makassar*. *6*(1): 27–32.
Steers, Richard. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Erlangga.
Supriyono. 2000. *Sistem Pengendalian Manajemen* (Edisi Pertama). BPFE.
Tafrizal. 2026. *Wawancara dengan Tafrizal, Pekerja Sosial (Peksos) Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota*.
Taufiqurrohman, A., & Hidayat, R. 2025. *Peran nahdlatul ulama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara*. *2*(6): 816–823.
Ulul, R., Sugianto, I., & Trijayanti, R. M. 2025. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII) Fiqh Siyasah : Tugas Pemimpin Dalam Islam*. *3*(1), 161–176.

Ustman. 2026. *wawancara dengan pengurus Masjid Raya Nagari Halaban*.
Vibriyanti, Deshinta. 2019. *Lansia sejahtera: tanggung jawab siapa?* Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Wahab, Solichin. 2008. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara.
Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Media Pressindo.
Zulkifli. 2026. *Wawancara dengan Zulkifli, Sekretaris Nagari Halaban*. Nagari Halaban.

UIN IMAM BONJOL
PADANG